

Penerapan Digital Governance Untuk Mendukung Transformasi Perusahaan Di Sektor Jasa Keuangan

Dwi Kurniawan
Kepala Grup Pengembangan Aplikasi SI
Otoritas Jasa Keuangan

GRC Series 2021 : Penerapan Digital Governance dalam Transformasi Perusahaan di Era Disrupsi
Jakarta, 7-8 Juli 2021
PT MRT Jakarta

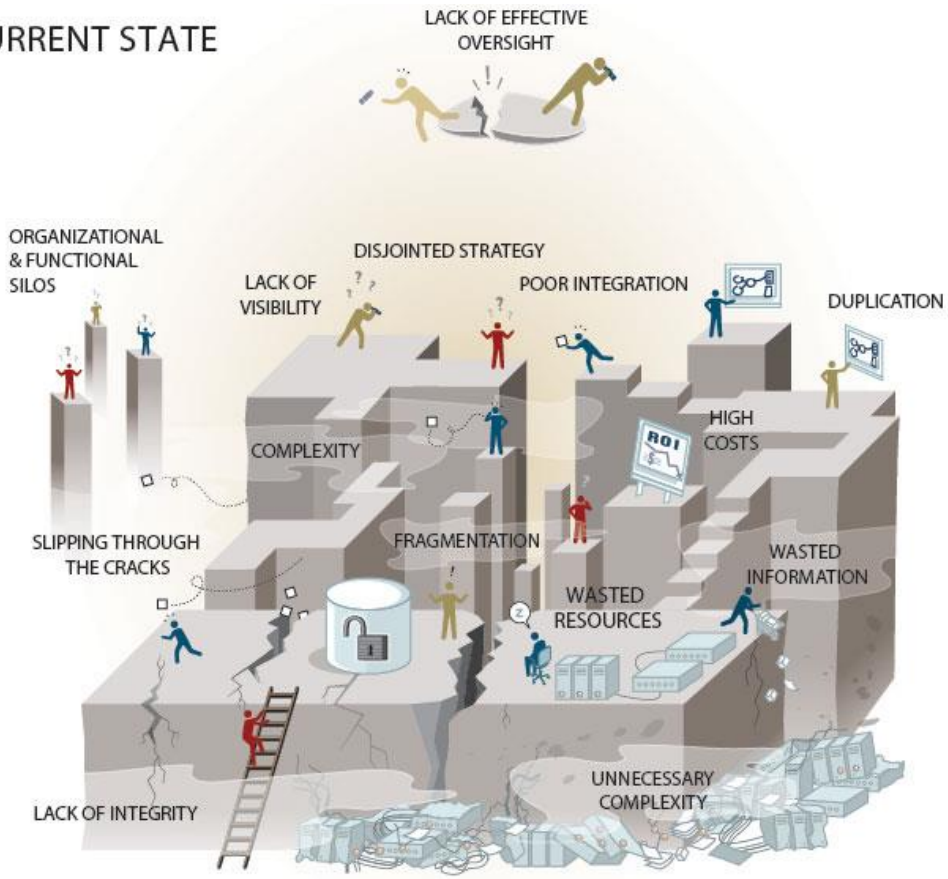
AGENDA

- 1 **DIGITAL GOVERNANCE : GRC DAN TI**
- 2 **DIGITAL GOVERNANCE DI OJK**
- 3 **DIGITAL GOVERNANCE DI INDUSTRI JASA KEUANGAN**

1. DIGITAL GOVERNANCE : GRC DAN TI

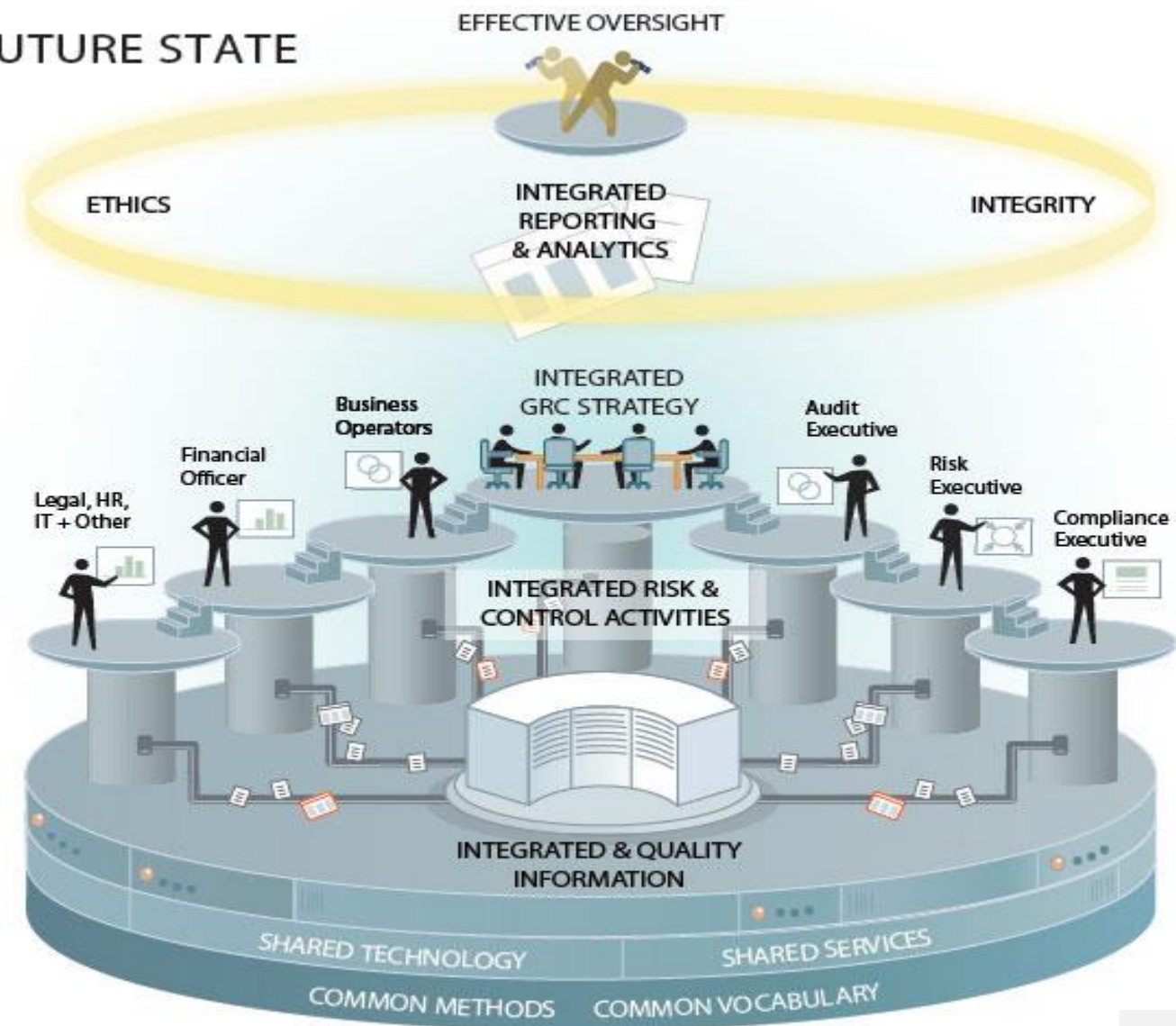
Integrated GRC

CURRENT STATE



©2012 OCEG, Permission by OCEG is required for reproduction and/or use of material www.OCEG.org -- Derived from the OCEG GRC Illustrated Series

FUTURE STATE

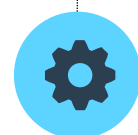


©2012 OCEG, Permission by OCEG is required for reproduction and/or use of material www.OCEG.org -- Derived from the OCEG GRC Illustrated Series

1. DIGITAL GOVERNANCE : GRC DAN TI

Digital governance is a discipline that focuses on establishing clear accountability for digital strategy, policy, and standards (Lisa Welchman)

Komponen Keunggulan GRC (Panduan Mencapai Keunggulan GRC)



Process

1. Kultur transparansi informasi dan komunikasi yang memadai dan bertanggungjawab. [P1]
2. Kultur pembelajaran dan inovasi yang melekat disetiap lini. [P2]
3. Tata kelola yang efektif dengan pendefinisian struktur dan tugas yang memadai. [P3]
4. Manajemen risiko yang efektif dan melekat pada strategi bisnis yang berkelanjutan. [P4]



People

1. SDM yang andal dan berintegritas. [M1]
2. Peningkatan pengetahuan berkelanjutan dan pengukuran kinerja yang efektif. [M2]
3. Pemberian penghargaan atas kinerja dan remunerasi yang tepat. [M3]



Tools

1. Sistem informasi yang mendukung kolaborasi dan diseminasi informasi untuk pengambilan keputusan yang memadai. [T1]
2. Metode dan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau deviasi atas objektif dan ancaman baru. [T2]



Interaksi Model Keunggulan GRC

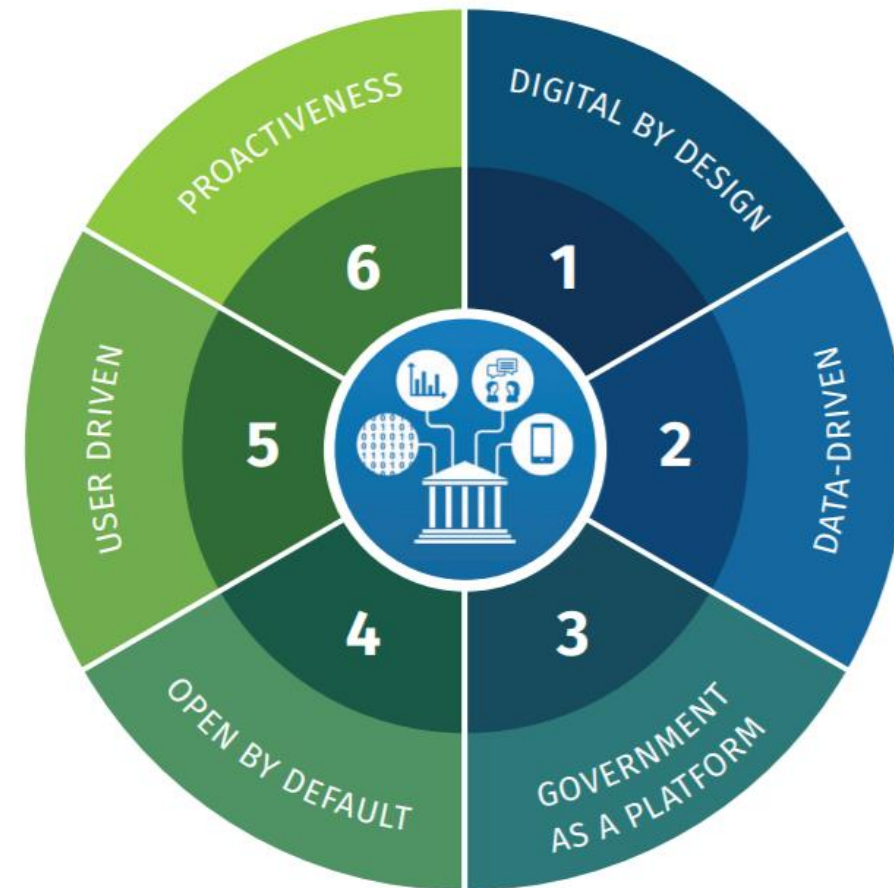
1. DIGITAL GOVERNANCE : GRC DAN TI

Digital Government Policy Framework (DGPF) : a policy instrument to help governments identifying key determinants for effective design and implementation of strategic approaches to transition towards higher levels of digital maturity of their public sectors.

A mature digital government:

- is **digital by design** when govern and leverage digital technologies to rethink and re-engineer public processes, simplify procedures, and create new channels of communication and engagement with stakeholders;
- is **data-driven** when values data as a strategic asset and establishes the governance, access, sharing and re-use mechanisms for improved decision-making and service delivery;
- **acts as platform** when deploys platforms, standards and services to help teams focus on user needs in public service design and delivery;
- is **open by default** when makes government data and policy-making processes available to the public, within the limits of existing legislation and in balance with national and public interest;
- is **user-driven** when accords a central role to people's needs and convenience in the shaping of processes, services and policies; and by adopting inclusive mechanisms that enable this to happen;
- is **proactive** when anticipates people's needs and respond to them rapidly, avoiding the need for cumbersome data and service delivery processes.

The OECD Digital Government Policy Framework



2. DIGITAL GOVERNANCE DI OJK

Digital Governance TI di OJK mengacu pada berbagai standar dan best practice yang disesuaikan dengan kondisi di OJK dan Indonesia.

Pengelolaan Sistem Informasi



**Control Objectives
for Information
Technologies**

Manajemen Layanan Sistem Informasi



**Information
Technology
Infrastructure
Library**

Manajemen Keamanan Sistem Informasi



**ISO/IEC
27001:2013**

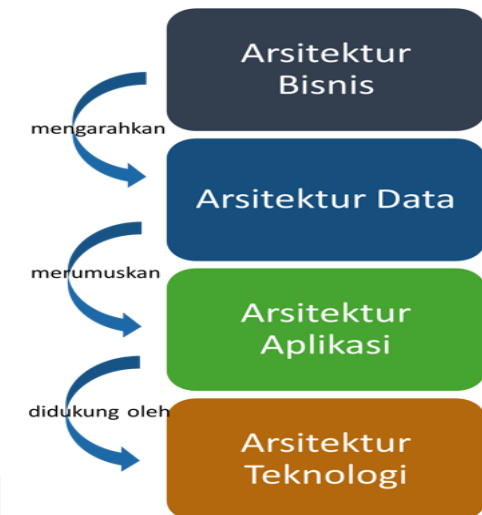
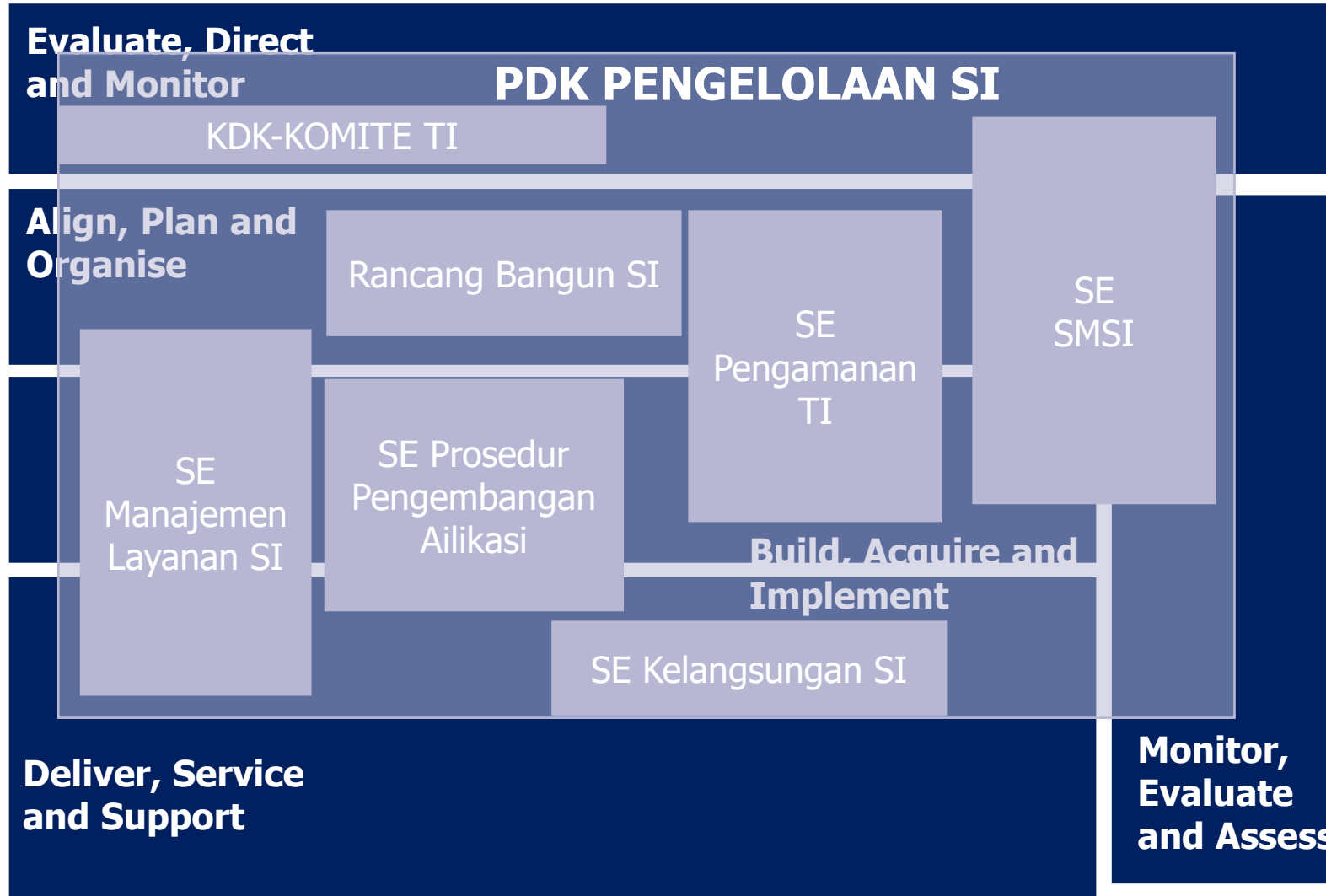
Pengelolaan Data dan Informasi SJK Terintegrasi



**DAMA-DMBOK:
Data Management
Body of Knowledge**

2. DIGITAL GOVERNANCE DI OJK

Ketentuan Tata Kelola TI dan Rancang Bangun Sistem Informasi OJK



2. DIGITAL GOVERNANCE DI OJK

Contoh Aplikasi-aplikasi di OJK

<p>Aplikasi Pelaporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) • Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA) • Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) • Sistem Informasi Pelaporan Terintegrasi (SILARAS) • E-Reporting PM dan IKNB 	<p>Aplikasi Publikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Website OJK • Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital • Sistem Informasi Ketentuan dan Peraturan Online
<p>Aplikasi Perizinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) • Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) 	<p>Aplikasi Pertukaran Data Antarlembaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pertukaran Data BI-OJK (SAPIT) • Pelaporan.id (Portal Integrasi Pelaporan OJK-BI-LPS)
<p>Aplikasi Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Pengawasan Perbankan (SIP) • Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal (SIPM) • Sistem Informasi Pengawasan IKNB (SI-IKNB) • Sistem Informasi Pengawasan LKM (SI-LKM) • Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) • Sistem Informasi APU dan PPT (SIGAP) 	<p>Integrasi Data & GRC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enterprise Data Warehouse (EDW) • Big Data Analytics • Master Data Management (MDM) • Continuous Audit Continuous Monitoring(CACM), Whistle Blowing System, Sistem Pengendalian Gratifikasi • Sistem Informasi Pelaku Di LJK Terintegrasi (SIPUTRI)
<p>Aplikasi Pengaturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Ketentuan dan Peraturan Online OJK • Rule-Making-Rule 	<p>Platform Pertukaran Data</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Middleware • Application Programming Interface (API)
<p>Aplikasi Edukasi & Perlindungan Konsumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) • Online Platform Informasi dan Edukasi Keuangan (OPIK) 	<p>Platform Informasi Debitur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inquiry informasi debitur dari Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB • Pelayanan masyarakat melalui Sistem Online Antrian

Contoh Pencapaian Digital Governance OJK

Raih Penghargaan KPK, OJK Terapkan Standar Tertinggi Antikorupsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik kategori kementerian dan lembaga. OJK juga menerima penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020.



OJK Meraih Juara di Kompetisi Contact Center dan Profesional IT

OJK meraih juara *The Best Helpdesk in Asia Pacific* di Thailand, dan Juara dalam kategori *The Best Contact Center Support Professional IT in the World* di Barcelona Spanyol



Prestasi OJK di Akhir Tahun

3. DIGITAL GOVERNANCE DI INDUSTRI JASA KEUANGAN

Peraturan OJK untuk Industri Jasa Keuangan terkait Digital Governance

- Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Penggunaan TI Oleh Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TI (*Fintech*).
- Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 12 /POJK.03/2018 Tahun 2018 Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
- Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

- Peraturan2 tersebut menerapkan prinsip GRC dan Tata Kelola TI termasuk manajemen risiko dan pengamanan TI
- Dengan kebijakan tersebut maka IJK diharapkan dapat memanfaatkan TI dengan optimal untuk mengembangkan bisnis dan layanan kepada konsumen

COBIT®

OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

JAK
IR-eBANKING



ISO/IEC 27001:2013



3. DIGITAL GOVERNANCE DI INDUSTRI JASA KEUANGAN

Manfaat Penerapan Digital Governance di IJK :

- Memastikan strategi, kebijakan dan standar digital yang akuntabel
- Memastikan tercapainya *business value* dari pemanfaatan digital di perusahaan dengan melaksanakan *business and IT alignment*, *resource management*, *risk management* dan *performance measurement*
- Memperkuat GRC guna mendukung transformasi perusahaan
- Meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan



Perbankan

Mobile banking, Internet banking, Phone banking, EDC (*credit card*), *e-money*, *e-KYC*



IKNB

Pegadaian Digital, *Insurance Technology* (InsurTech), Taspen SmartCard



Pasar Modal

Jakarta Automated Trading System (JATS), *Electronic Clearing and Guarantee System (e-Clear)*, *Central Depository and Book Entry Settlement (C-BEST)*





Fintech

- *Peer-to-per Lending (Pinjaman Online)*
- *Crowdfunding*
- *Payment Gateway*



Terima Kasih

 Ir. Dwi Kurniawan MBA, CISA, CISM

 dwi.kurniawan@ojk.go.id